



Bupati Sri Purnomo Bela Petani Sleman

■ Pemkab Sleman Tak Sependapat Kebijakan Impor Beras



Saya ikut petani. Petani menolak impor, saya juga menolak

Sri Purnomo
Bupati Sleman

SLEMAN, TRIBUN - Bupati Sleman, Sri Purnomo menegaskan akan selalu berpihak pada petani. Ketika isu impor beras pun mulai menyeruak akhir-akhir ini, dengan lantang ia menyebutkan menolak dengan rencana kebijakan tersebut.

"Saya ikut petani. Petani menolak impor, saya juga menolak," katanya kepada *Tribun Jogja*, di kantornya, Selasa (16/1).

Sebagai informasi, Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan impor 500.000 ton beras untuk menjaga cadangan pangan nasional. Adanya pasokan beras impor itu diharapkan pemerintah bisa mengantisipasi terjadinya gejolak harga di daerah dengan penetrasi pasar.

Menurutnya, selain akan berdampak pada petani karena harga gabah petani menjadi menurun, Kabupaten Sleman sendiri sejauh ini

masih surplus beras. Patut diketahui, pada 2017 saja Kabupaten Sleman surplus beras hingga 120 ribu ton.

Pun begitu pada bulan Januari ini, Kabupaten Sleman akan melakukan panen seluas 2.604 hektare. Angka tersebut masih akan disusul lagi di bulan Februari dengan lahan panen yang semakin luas lagi yaitu mencapai 7.056 hektare.

• ke
halaman
11

KATA MEREKA



Kalau di Yogya tidak ada masalah. Kalau mengenai impor, kebijakan pusat saja

Haryadi Suyuti
Wali Kota Yogyakarta

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Bupati Sri Purnomo Bela Petani

• Sambungan Hal 1

"Bulan Februari besok, luas panen mencapai 7.056 hektare. Sudah lebih banyak dibanding bulan ini," tuturnya.

Di tahun 2018 ini pun, Sri Purnomo juga menegaskan akan mempertahankan surplus beras. Salah satunya dengan sistem mina padi atau metode pertanian yang menggabungkan tanam padi dengan budidaya ikan.

"Surplus terus dipertahankan. Selain selalu meng-kuti arahan dari Pementan terkait dengan benth unggul maupun pengembangan sistem mina padi. Hasil bisa lebih baik," katanya.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Stuyuti tidak ambil pusing dengan kebijakan pemerintah pusat terkait impor beras. Hal tersebut dikarenakan stok beras di Kota Yogyakarta sendiri tidak terganggu hingga saat ini.

"Kalau di Yogya tidak ada masalah. Kalau mengenai impor, kebijakan pusat saja," terangnya melalui sambungan telepon, Selasa (16/1).

Haryadi menyatakan untuk ketersediaan bahan pokok, khususnya beras, pada musim penghujan ini dinilai masih mencukupi kebutuhan warga.

"Di Yogya Insya Allah aman. Nanti kita lihat. Kami punya mekanisme untuk memantau kebutuhan bahan pokok," tuturnya pada *Tribun Jogja*.

Tidak cocok

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menilai, kebijakan impor beras tidak bisa dipukul rata. Artinya, hanya tepat guna apabila diaplikasikan untuk daerah perkotaan saja, yakni wilayah yang tak memiliki petani dan tidak mampu memproduksi beras dan padi.

"Tepat jika peruntukannya (impor beras) bagi wilayah yang tidak punya petani, ti-

dak produksi beras, seperti perkotaan," kata Hasto, Selasa (16/1).

Dalam upaya menstabilkan harga beras di pasaran, menurutnya akan lebih bijak apabila dilakukan kebijakan membeli beras dari petani sebagai jalan untuk operasi pasar. Skema ini tentu saja sangat cocok untuk wilayah kabupaten dan pedesaan yang punya lahan pertanian dan mampu memproduksi beras sendiri. Ketimbang, operasi pasar menggunakan beras dari luar negeri.

Ia menyatakan lebih setuju apabila beras untuk operasi pasar menggunakan produk dari gabungan kelompok tani (gapoktan). Pemerintah daerah bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa bekerja sama untuk menyerap beras lokal dengan membeli langsung dari petani setempat.

Lalu, lanjutnya, beras itu dipenetrasi ke pasar lewat operasi beras, sehingga harganya bisa lebih murah. Skema yang sama juga diterapkan di Kulonprogo untuk program beras daerah (rasda) ataupun beras sejahtera (rastra).

Artinya, menurut Hasto, ada nilai manfaat yang lebih dalam mendukung daya petani setempat sekaligus menstabilkan pasar melalui penyerapan beras petani lokal. "Dobel manfaat, kan? Barulah, wilayah kota boleh operasi pasar dengan bersumber dari beras impor," kata Hasto.

Namun, hal itu diaukunya membutuhkan komitmen ekstra keras dan ketekunan dari semua pihak, tidak bisa serta merta dipukul rata cari enakannya saja. Ada kerja ideologis yang cukup berat untuk dilaksanakan namun diyakini bisa membawa kesejahteraan masyarakat lebih luas.

Selain surplus

Sementara itu, Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengatakan, ketersediaan pangan di Kulonprogo tidak perlu dikhawatirkan karena

pasokannya cukup, khususnya untuk beras. Tingkat produksi padi di Kulonprogo saat ini mencapai 6,7 ton gabah kering panen dan setiap tahun terjadi surplus beras antara 18 ribu sampai 20 ribu ton.

"Di tingkat pedagang memang ada kenaikan harga namun ketersediaan pangan mencukupi," kata Sutedjo.

Penyebaran luas panen di Kulonprogo terdistribusi sepanjang tahun kecuali pada September, Oktober dan November, karena masuk musim tanam. Panen baru dimulai pada sekitar minggu ketiga Desember dengan luasan sekitar 4.500 hektare yang bisa diselesaikan di Januari ini.

"Pada 2017 lalu di Kulonprogo juga ada penambahan cetak sawah baru 80 hektare. Ini akan memperluas sebaran luas panen," kata Sutedjo.

Terimbas pariwisata

Posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata dinilai turut berpengaruh terhadap menajaknya harga beras di pasaran. Permintaan pasar yang meningkat tidak ditanggapi lancarnya distribusi sehingga harga beras terkerek.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) DIY, Arif Yuniato Kurniawan, Selasa (16/1) lalu. Menurutny, ada sejumlah faktor penyebab meningkatnya harga beras di DIY. Antara lain karena tersendatnya distribusi dan tingkat permintaan yang tinggi di musim liburan akhir tahun lalu.

"Karena daerah tujuan wisata, banyak wisatawan berkunjung ke DIY saat libur akhir tahun sehingga permintaan terhadap beras cenderung meningkat. Pada saat yang sama, distribusi juga tersendat sehingga memicu kenaikan harga," kata Arif di sela kegiatan operasi pasar beras Badan Urusan Logistik (Bulog) di Pasar Wates.

Di sisi lain, beras untuk masyarakat miskin atau be-

ras sejahtera (rastra) periode Desember juga telah didistribusikan pada November. Ketika rastra periode Januari belum dilakukan, Rumah Tangga Sasaran Pemerita Manfaat (RTSPM) yang biasanya mengonsumi rastra ikut membeli beras di pasar.

Dari sini terjadi perebutan sisa stok beras di pasaran berupa beras kualitas medium turun giling yang berujung pada kenaikan harga. Namun begitu, stok beras di DIY ditegaskannya masih aman. Bulog disebutnya saat ini memiliki stok hingga kisaran 5.000 ton meski di tingkat petani mulai menipis.

"Februari nanti sudah mulai panen sehingga kondisinya aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Berapa pun yang diminta outlet, kami siap kirim," imbuh Arif.

Operasi pasar

Dalam operasi pasar di sejumlah pasar tradisional di Kulonprogo itu, Bulog menggendeng Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, dan Perpadi. Kegiatan akan dilangsungkan hingga akhir Januari 2018 dengan sasaran pasar tradisional di Wates, Pengasih, Bendungan, dan Sertolo. Total 130 ton beras kualitas medium digelontorkan ke pasaran seharga Rp9.350 per kilogram.

Ketua DPC Perpadi Kulonprogo, Margjono menjelaskan, beras dari Bulog diolah terlebih dahulu oleh Perpadi lantas disalurkan ke masyarakat melalui seluruh outlet mitra Bulog di pasar tradisional. Kualitas beras dalam operasi pasar ini disebutnya sama dengan beras medium stok nasional atau setara IR64 yang seharga Rp10.500 per kilogram.

"Beras murah disediakan dalam jumlah banyak, agar bisa menjadi pilihan bagi konsumen. Perpadi menargetkan harga beras kualitas medium versi stok nasional bisa normal kembali di bawah HET Rp9.450," katanya. (app/ing/kuryudrid/oto)

Stok Beras DIY-Nasional Aman

STOK beras di Bulog Divre Yogyakarta untuk kebutuhan stok selama kurang lebih empat hingga lima bulan ke depan masih aman. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bulog Divre Yogyakarta Miftahul Ulum pada *Tribun Jogja*, Selasa (16/1).

Kurang lebih, stok beras saat ini di Bulog Divre Yogyakarta mencapai 6.000 ton. Sementara kebutuhan beras di DIY mencapai ang-

ka 3.000 ton. Untuk bulan kedua tahun ini diselingi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Untuk sistem pola baru penyaluran dengan bansos ini memang lebih memudahkan, sebab pembayaran langsung dari pusat," ujar Miftahul.
Soal ada penolakan terhadap impor beras, Miftahul mengatakan pihaknya hanya mengikuti Bulog pusat. Sampai saat ini kebutuhan beras di DIY masih aman.

Surplus 20 juta ton

Sementara itu di level nasional, produksi padi nasional yang dihasilkan tahun 2017 ini telah mencapai surplus, dipastikan hingga tahun 2018 mendatang tidak diperlukan impor beras lagi, karena kebutuhan pangan untuk beras telah tercukupi.

• ke halaman 11



Produksi DIY

- Produk beras di Sleman pada 2017 surplus 120 ribu ton.
- Pada Januari dan Februari, Sleman akan panen di area 9.960 hektar
- Produksi beras di Kulonprogo mencapai 6,7 ton gabah kering panen setiap tahun
- Kulonprogo juga selalu surplus beras mencapai 20 ribu ton per tahun.
- Bulog menegaskan Stok beras di Bulog Divre Yogyakarta aman untuk 5 bulan ke depan.
- Saat ini, stok beras di Bulog Divre Yogyakarta mencapai 6.000 ton

Stok Beras DIY-Nasional Aman

• Sambungan Hal 1

Direktur Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan, pihaknya mengklaim produksi padi mengalami surplus sebesar 20 juta ton padi.

Sementara target produksi hingga tahun mendatang mencapai 79 juta ton padi, atau jika dikonversi 60 juta ton beras. Sedangkan kebu-

tuhan konsumsi nasional hanya sebanyak 33-35 juta ton beras per tahun.

"Prediksi dari kita, produksi pertanian kita sudah aman, kita sudah tidak impor beras lagi di tahun 2017 ini. Untuk tahun 2018 pun kita tidak perlu impor lagi," ujarnya, Jumat (23/12) saat panen raya padi di Dusun Sikapan, Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Magelang.

Tambah tanam

Edhy melanjutkan, surplus nasional ini dapat tercapai dengan terus melakukan percepatan luas tambah tanam.

Pihaknya menargetkan luas tambah tanam pada tahun 2018 dapat tercapai 16.899.650 hektare luas tanam, dengan luas panen 16.335.202 hektare.

Produktivitas produksi setiap hektare rata-rata nasional mencapai 5,8 ton per hektare. Dengan jumlah tersebut, dapat dihitung jumlah produksi padi dapat mencapai 87 juta ton pada tahun 2018 mendatang.

"Luas tambah tanam dalam satu tahun, dan setiap bulan ditargetkan. Di samping luas existing, di areal

pertanaman baru, di lahan rawa, di lahan perkebunan dengan padi gogo, di lahan perhutanan sosial, menanam di bawah tegakan, semisal di perkebunan kelapa kita juga tanam," ujarnya.

Edhy mengatakan, melalui upaya tersebut, pihaknya menargetkan produksi padi mencapai 79 juta ton, tahun 2018 bertamah menjadi 81 juta ton padi. "Stok beras di Indonesia sudah cukup, kita sudah tidak perlu impor beras lagi dari negara lain," ujarnya. (rfk/app/ing/kur/yud/rd/nto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005